



Surabayakita.com - "Kami berharap Surabaya tetap bisa menyelesaikan program e-KTP ini tepat waktu sesuai deadline pemerintah. Karenanya tiap hari kami selalu memberikan layanan e-KTP termasuk di Royal Plaza," ujar Suharto. (red)

Sementara Moh. Suharto Wardoyo, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya mengatakan pihaknya sudah melakukan upaya jemput bola. Tidak hanya di tahanan polisi atau lapas tetapi juga di sekolah melalui program Go To Schools.

Edi Budi Prabowo juga mengatakan Dispendukcapil sudah memiliki mobil operasional untuk layanan e-KTP ini. Kendaraan roda empat ini kalau dimanfaatkan maksimal maka akan menunjang keberhasilan jumlah warga yang mengurus e-KTP.

"Saya kira tak masalah jika Surabaya meniru menerapkan konsep itu, toh buktinya mereka hampir bisa menuntaskan program e-KTP nya," ujar Edi. Sebab pengurus RT RW ini sangat tahu kondisi warganya di lingkungan masing masing.

Beberapa daerah yang turut melibatkan perangkat RT RW ini antara lain Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto. Ternyata program e-KTP dengan melibatkan pengurus RT RW ini sukses dilaksanakan di kabupaten tersebut.

Pemkot Surabaya sebenarnya juga bisa meniru konsep daerah lain yang sudah berhasil menuntaskan e-KTP nya ini. Mereka tak segan untuk melibatkan pengurus RT RW setempat untuk wajib e-KTP ini.

"Harus ada upaya jemput bola dengan sasaran yang tepat. Sehingga pada akhir tahun ini program e-KTP bisa dituntaskan," ujar politikus Partai Golkar ini.

Kalau tidak ada upaya lebih untuk program nasional e-KTP ini dikhawatirkan masyarakat akan ogah ogahan datang mengurusnya. Demikian juga target pada akhir tahun ini semua warga Surabaya memiliki e-KTP riskan tak tercapai.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Edi Budi Prabowo, Dispendukcapil sebagai SKPD yang menangani langsung masalah ini tak boleh berpangku tangan. Harus ada program inovasi sehingga semua warga bisa mengurus e-KTP nya. Melihat jumlah warga yang tak be e-KTP ini tentu patut dipertanyakan bagaimana kinerja Dispendukcapil selama ini. Sebab program e-KTP ini sudah lama dimulai dan pada 1 Januari 2014 semua warga sudah harus berganti dari model lama menjadi baru (e-KTP).

Kinerja Dispendukcapil Kota Surabaya dipertanyakan Komisi D DPRD Surabaya. Sebab untuk program e-KTP di Surabaya sampai saat ini 400 ribu warga belum memilikinya.